

RENCANA STRATEGIS



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep ini disusun sebagai kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya meningkatkan peranan organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan strategi ini konsisten dengan pedoman-pedoman dalam perencanaan seperti RPJP dan RPJM Kabupaten Sumenep dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diharapkan buku Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep ini, digunakan pula sebagai informasi perencanaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait serta masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Semoga ini bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya dalam rangka pengembangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep, serta terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan buku Staregi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumenep,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. H. MUHAMMAD SYAHRIL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610522 198608 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya perubahan secara mendasar di seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat, oleh karenanya perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik kearah desentralistik diharapkan semakin mampu menjawab berbagai persoalan, tantangan dan tuntutan masyarakat yang makin berkembang secara dinamis dan global, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (Good Governance) transparan serta dengan Akuntabilitas Kinerja yang makin efektif dan efisien serta kinerja Pemerintah yang bersih, transparan, adil dan bertanggung jawab (clean govermance) sebagai bentuk perwujudan pencapaian tujuan pembangunan kabupaten Sumenep dengan SUPER MANTAP.

Indikator keberhasilan atas suatu kebijakan dan program pada unit kerja secara kualitatif dapat dilihat dari hasil pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan berdasarkan visi dan misi serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan variabel tertentu, disamping memperhatikan faktor - faktor yang dapat mempengaruhi baik yang

mendukung maupun yang tidak mendukung seperti SDM sarana dan prasarana termasuk faktor dana, karenanya untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan suatu kebijakan program perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus melalui pengukuran Akuntabilitas Kinerja pada setiap unit kerja sehingga dapat mengetahui secara kongkrit pencapaian hasil yang diperoleh serta dapat menganalisa dan mengkaji ulang berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi selama periode Tahun Anggaran, sehingga dapat merumuskan kembali kebijakan dan program pada tahun berikutnya sebagai solusi dan antisipasi terhadap fenomena dan permasalahan yang aspiratif terhadap kepentingan publik.

Kegiatan pembangunan memerlukan dukungan sumber-daya alam, baik sebagai wahana kegiatan maupun sebagai sebagai factor produksi yang dipergunakan menopang aktifitas kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Keterkaitan antara penduduk dan sumberdaya alam sangat erat sekali. Perubahan yang terjadi atas dinamika penduduk sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek lingkungan.

Akibat krisis ekonomi, berbagai pihak terutama pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi, termasuk upaya mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun dalam kondisi krisis ekonomi semua pihak tetap berharap lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada pemerintah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan.

Selanjutnya eksploitasi sumberdaya alam apabila tidak disertai dengan penerapan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan, penerapan terhadap

aturan-aturan yang ada dan tanggungjawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai macam masalah. Masalah yang muncul akibat tidak ada keseimbangan tersebut antara lain ; (a) munculnya kasus pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) ; (b) degradasi sumberdaya hutan tanah yang berakibat terhadap penurunan produktifitas pertanian ; (c) banjir dan kekeringan ; (d) hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah ; belum adanya kondisi yang serasi antara ketersediaan sumberdaya alam dengan dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, social, budaya dan lingkungan. Untuk itu berbagai upaya melestarikan sumberdaya alam, peningkatan kesadaran pihak-pihak yang terkait dalam mengelola sumberdaya alam dan menjaga kesinambungan lingkungan, perlu ditingkatkan. Berbagai upaya strategis untuk menangani permasalahan bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan pemerintah dengan menetapkan kebijakan antara lain ; rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi, peningkatan koordinasi dan pengawasan, menata system pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan peranserta masyarakat.

Hal tersebut, telah menjadi ketetapan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan menjadi prioritas pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021 yang akan memberi arah pembangunan bidang lingkungan hidup periode tersebut.

Perencanaan sendiri, menurut pengertian yang sesungguhnya adalah suatu penanganan masalah secara holistic. Perencanaan adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan sering berarti penetapan tujuan dan prioritas serta serangkaian kegiatan untuk memcapainya. Perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien, lebih dari itu perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya (Bryant & an White, 1987).

Di era otonomi seperti sekarang ini, salah satu perencanaan pembangunan yang dibutuhkan daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep untuk menjadi pemandu atau acuan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah, selain RPJPD Kabupaten Sumenep 2005-2025, adalah RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021. Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disini pada dasarnya adalah dokumen lima tahunan, yang memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan, RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, di mana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Esensi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 akan memuat rencana pembangunan berskala daerah selama jangka waktu lima tahun yang wajib dijadikan sebagai komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Formulasi arah

kebijakan dan program-program pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan proses multidimensional yang ditandai dengan perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang senantiasa bersendikan nilai-nilai religi dan kearifan budaya local demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep secara berkeadilan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021, selain memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan arahan atau pemandu bagi penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sumenep yang benar-benar demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berlandaskan peraturan dan perundangan sebagai berikut adalah ;

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
7. Kepres Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
9. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Kawasan Lindung Daerah di Kabupaten Sumenep ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Sumenep.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021

2. Memetakan profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dan merumuskan isu-isu prioritas dan permasalahan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.
3. Mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor pembangunan lain dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan RenstraK/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan..

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **Fungsi** untuk :

- Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan administrasi dinas di lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 8 Seksi, 3 Sub Bagian serta beberapa staf

Adapun Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang, sebagai berikut :

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, kerjasama, humas dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance);
 - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Tata Lingkungan

1. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan tata lingkungan;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. penyusunan dokumen RPPLH;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup ;
 - g. penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
 - h. pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - j. pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses izin lingkungan ;
 - k. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;

- l. pemberian rekomendasi izin lingkungan;
- m. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- o. perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- p. pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- q. sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- r. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Bidang Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah B3
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana, pengembangan investasi, penanganan dan pengelolaan sampah dan Limbah B3;

- b. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- c. perumusan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah;
- d. pembinaan sumber daya masyarakat pengelola sampah TPA/TPST;
- e. penetapan target pengurangan dan prioritas penanganan jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. pengoordinasian pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah);
- g. pemberian rekomendasi perizinan dan pengelolaan limbah B3;
- h. pemetaan potensi dan pengelola limbah B3;
- i. pemantauan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, penimbunan dan pengolahan limbah B3;
- j. penyiapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- k. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih dan sehat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pencegahan pencemaran lingkungan dan standarisasi bidang lingkungan;
 - b. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan pencemaran melalui pemberian informasi, perencanaan dan pembangunan prasarana pengolah limbah sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemulihan pencemaran melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. penyiapan dan pengembangan sistem informasi peringatan dini terhadap potensi dampak pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
 - i. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;

- j. pengoordinasian kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

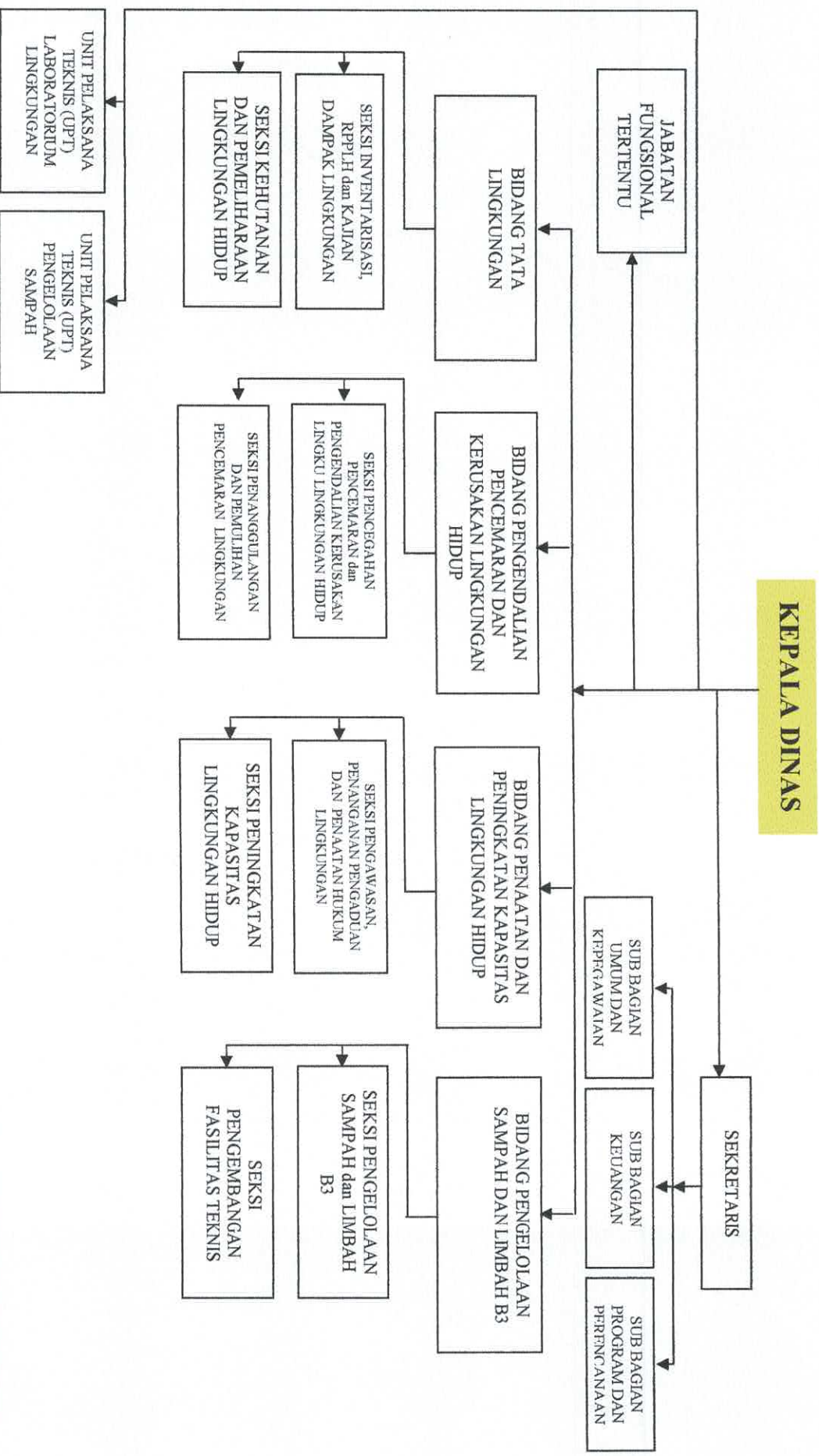
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

1. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan panaan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan kegiatan;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

- f. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
- i. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- j. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- k. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan hidup dan penghargaan Lingkungan hidup;
- l. penyusunan profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- n. pengoordinasian kebijakan Penataan Lingkungan Hidup;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penataan Lingkungan Hidup; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP**



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan meningkatnya profesionalisme kinerja yang berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 129 orang dan Tenaga Outsourcing sebanyak 207 orang, dengan rincian Jumlah PNS sebagai berikut:

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 10 orang
- S-1 : 19 orang
- D-3 : 4 orang
- SLTA : 48 orang
- SLTP : 17 orang
- SD : 33 orang

Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan :

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 5 orang
- Golongan III/d : 7 orang
- Golongan III/c : 8 orang
- Golongan III/b : 4 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 8 orang
- Golongan II/c : 21 orang
- Golongan II/b : 16 orang
- Golongan II/a : 6 orang
- Golongan I/d : 5 orang
- Golongan I/c : 9 orang

Dengan jumlah pegawai sebanyak 129 orang sudah memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, hanya saja masih kurang untuk tenaga ahli lingkungan karena sampai tahun 2016 belum ada yang mempunyai sertifikat ahli lingkungan.

2.2.2 Aset/Modal

Sarana dan Prasarana

1. Tanah

Tanah bangunan kantor masih merupakan aset Propinsi Jawa Timur

Tanah TPA Batuan

Nilai Aset Rp. 2.400.000.000

2. Peralatan dan Mesin

- Jenis Alat Berat

Yang terdiri antara lain mesin pencacah sampah, mesin pengayak dan mesin diesel yang mana lokasi penempatan tersebar di beberapa kecamatan dalam rangka pengolahan sampah organik

Nilai aset Rp. 2.196.927.150

- Jenis alat angkutan

Mobil : 9 unit

Sepeda motor roda 2 : 13 unit

Sepeda motor roda 3 : 2 unit

Dengan perolehan antara tahun 1989 sampai dengan 2015

Nilai Aset Rp. 1.589.401.133

- Jenis Alat bengkel

Yang terdiri antara lain PH Meter, GPS, Timbangan dan Pelobang biopori

Dengan perolehan antara tahun 2001 sampai dengan 2015

Nilai Aset Rp. 72.287.500

- Jenis alat kantor dan rumah tangga

Terdiri dari brankas, komputer, laptop, printer, lemari, kipas angin, AC, filling kabinet

Dengan perolehan antara tahun 1984 sampai dengan 2015

Nilai Aset Rp. 2.941.390.244

- Jenis Alat Studio dan Komunikasi

Terdiri dari kamera, Handycame, Wireless, Faksimile, OHP, LCD, Sound System.

Dengan perolehan antara tahun 1998 sampai dengan 2015

Nilai Aset Rp. 270.557.750

- Jenis alat Laboratorium

Alat laboratorium lingkungan yang berada diUPT Laboratorium BLH

Dengan perolehan antara tahun 2004 sampai dengan 2015

Nilai Aset Rp. 3.543.103.100

Dalam operasional pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup pada saat ini belum dicukupi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai organisasi professional. Aset yang dimiliki yaitu 9 unit mobil Dinas dengan kondisi rusak parah sebanyak 3 unit, 13 unit sepeda motor Dinas serta Peralatan dan Perlengkapan kantor sebagai Sarana yang ada dalam melaksanakan tugas. Sedangkan gedung perkantoran yang digunakan masih merupakan asset Provinsi Jawa Timur.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep merupakan kinerja melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh

Hasil analisis pencapaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target Tahun 2015 dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan RPJMD

Pengukuran kinerja Urusan Lingkungan Hidup yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup menghasilkan nilai rata-rata sebesar **87.25%**, ini termasuk predikat **Sangat Berhasil**.

Tabel 1.1
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2015	REALISASI TH. 2015	% CAPAIAN TH. 2015
1.	Pencemaran status mutu air	5	3,81	131,23
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL	97	102	105,15
3.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja dapat dicapai dan terdapat dua indikator yang melampaui target yaitu indikator Pencemaran status mutu air Dan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir berdasarkan indikator dalam RPJMD

Tabel 1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun 2014

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Sumber	Pencemaran status mutu air	BOD (mg/l)	5,6	4,43	123,08	5,3	3,81	131,23

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	7	8	9	10	11	12
Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL	Usaha	80	78	97,50	88	93	105,15
	Penegakan hukum lingkungan	%Kasus	100	100	100	100	100	100

Tabel 1.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Capaian 2012	Realisasi 2013	Capaian 2013	Realisasi 2014	Capaian 2014	Realisasi 2015	Capaian 2015
Pencemaran status mutu air	5,14	112,84	4,55	123,08	4,43	119,648	3,81	131,23
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL	70	90,91	78	97,50	93	105,68	102	105,15
Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel di atas menggambarkan perkembangan capaian kinerja indikator tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

1. Pencemaran Status Mutu Air

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 131,23%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan capaian kinerja.

2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 105,15%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2012, 2013, dan tahun 2015 mengalami peningkatan capaian kinerja secara signifikan.

3. Penegakan hukum lingkungan

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja

tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 tetap dalam artian bahwa setiap kasus/pengaduan yang ada dapat ditindaklanjuti semua.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 1.4

No.	Indikator kinerja	Realisasi akumulasi s/d. Tahun 2015	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015	% capaian th. 2015
1.	Pencemaran status mutu air	3,81	5	131,23
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL/SPPL	102	97	105,15
3.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100

Berdasarkan tabel 1.3.1 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menghasilkan nilai rata-rata sebesar **112,13%**, ini termasuk predikat **Sangat Berhasil**. Dari tiga indikator yang ditetapkan telah berhasil mencapai target RPJMD Tahun 2015.

2.3.2. Akuntabilitas Keuangan

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memerlukan ketersediaan dana yang memadai. Dana atau biaya bagi penyelenggaraan bermanfaat dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan.

Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Penyelenggaraan tugas, fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2015 bersumber dari APBD sebesar Rp. 7.096.950.276. DAK

sebesar Rp. 1.593.850.000, DBHCHT sebesar Rp. 2.450.000.000. dengan total Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 11.140.800.276. Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2015.

Rencana dan Realisasi Belanja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2015

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Biaya			
		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
	BELANJA	11.140.800.276	10.622.895.554	517.904.722	95,35%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.589.607.721	2.517.138.336	72.469.385	97,20
	BELANJA LANGSUNG	8,551,192,555	8,105,757,218	445,435,337	94.79
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402,807,810	393,950,178	8,857,632	97.80
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	474,152,200	468,241,863	5,910,337	98.75
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,610,000	25,960,000	1,650,000	94.02
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	10,000,000	-	100.00
V	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,022,500	8,784,500	1,238,000	87.65
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,219,793,500	1,183,046,125	36,747,375	96.99
VII	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,649,571,500	1,560,860,471	88,711,029	94.62
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	933,770,745	924,357,500	9,413,245	98.99
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	440,150,800	404,754,300	35,396,500	91.96
X	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	465,427,000	451,760,400	13,666,600	97.06
XI	Program Peningkatan Sarana Kebersihan	467,886,500	444,391,600	23,494,900	94.98
XII	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	2,450,000,000	2,229,650,281	220,349,719	91.01

Dari tabel diatas terlihat bahwa, realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2015 sebesar Rp. 10.622.895.554,00 atau

Rp. 517.904.722,00. tidak terserapnya 100% anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep disebabkan karena adanya *belanja tak langsung* sebesar Rp. 72.469.385,00 yang merupakan kelebihan anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan. Pada *belanja langsung* tidak terserap sebesar Rp. 445.435.337,00 yang merupakan sisa anggaran mati.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

kendala dan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup belum memasyarakat secara luas, baik dalam strata pemerintah maupun masyarakat ;
2. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil;
3. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;
4. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk tidak peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kerja antar unit masih perlu ditingkatkan ;
3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai ;
4. Sarana dan prasarana operasional masih terbatas.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan tentang

2. Membuat Jaringan Informasi tentang database keadaan lingkungan Kabupaten Sumenep ;
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan Sarasehan;
4. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam Diklat lingkungan hidup ;
5. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan hidup

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang lingkungan hidup belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 4,65%, SLTA sebesar 39,53 %, Diploma sebesar 9,3% dan untuk S1 dan S2 masih sebanyak 46,51%, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.

2. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas pertanian, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang signifikan (baik roda 4 maupun roda 2), semakin menimbulkan beban pencemaran.
3. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan pelestarian lingkungan
4. Dampak pemanasan global

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri,
Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2011 – 2016 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , salah satunya Misi kedua yaitu; ” Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan” dengan tujuan: “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan Lingkungan hidup yaitu : "Meningkatnya kelestarian lingkungan".

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi Jawa Timur

Sasaran renstra kementerian lingkungan hidup

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi Sumber daya Hutan dan Lingkungan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran umum yang ingin dicapai Dinas Lingkungan

hidup Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2014-2019 adalah :

- 1) Meningkatnya luas lahan hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi;
- 2) Meningkatnya Sumberdaya Air terkonservasi;
- 3) Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir dan laut;

Apabila diperhatikan atas sasaran umum Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur tersebut, sasaran pada Urusan Lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Kondisi ruang saat ini dan rencana pengembangan kawasan

Kondisi tata ruang dan tata guna lahan di sekitar kawasan Perkotaan, Perdagangan, dan Pertanian, utamanya didominasi pertanian. Hal ini memberikan kontribusi tekanan kepada kondisi lingkungan.

Sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap semua sumber-sumber pencemar yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan

3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam rangka mencapai visi – misi maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- b. Adanya Struktur organisasi Dinas Lingkungan hidup yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan;
- c. Adanya indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh SKPD dan peraturan perundang undangan di Bidang Lingkungan hidup;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan

Faktor penghambat

- a) Kualifikasi teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep termasuk beban kerja yang diemban;
- b) Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- c) Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

3.6 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sumenep, Renstra Kementerian Lingkungan hidup, Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

1. Belum tersedianya Data Potensi dan Kerusakan Sumberdaya Alam
2. Peningkatan beban pencemaran baik industri maupun domestik
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup
4. Masih Luasnya Area lahan kritis, Kerusakan terumbu karang dan mangrove di Kabupaten Sumenep.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan standar pelayanan publik, maka Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan penetapan Tujuan sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dalam rangka mendukung capaian misi dan tujuan Bupati Sumenep.

Berdasarkan kondisi, potensi dan hasil kesepakatan stakeholders serta tujuan utama dibentuknya Dinas Lingkungan hidup dengan memperhatikan misi ke 2 RPJMD Kabupaten Sumenep yaitu : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

"Meningkatkannya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Vegetasi"

Rumusan Tujuan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan hidup dalam kurun waktu 2016 – 2021
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep dan juga stake holders
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep

Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup, telah disusun pula Sasaran Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Tujuan disusunnya Renstra SKPD Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep yaitu : "Meningkatnya Pengelolaan Sumber-sumber Pencemar"

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diatas tersaji dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten
Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	<i>Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Vegetasi</i>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup	<p>Persentase Peningkatan Tutupan Lahan</p> <p>Persentase Peningkatan Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Lingkungan</p> <p>Persentase Penanganan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Jumlah industri / perusahaan / badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)</p> <p>Volume sampah yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan pelayanan kebersihan dan persampahan di 3 kec. (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)</p> <p>Jumlah desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih</p>

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten
Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	<i>Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Vegetasi</i>	Meningkatnya Pengelolaan Sumber-sumber pencemar	<p>Luas Kawasan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Prosentase Sungai yang tidak tercemar</p> <p>Prosentase Titik Pantau dengan kualitas parameter NO2 dan SO2 dibawah ambang batas</p> <p>Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>Prosentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>Prosentase Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi</p> <p>Prosentase Layanan Laboratorium</p> <p>TPA dengan Sanitari Lanfill</p> <p>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</p>

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

5.1.1 STRATEGI

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu pokok yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka strategi kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut ;

1. Melakukan Upaya Pengelolaan Sampah dan B3 dengan penerapan teknologi ramah lingkungan
2. Mencegah dan menanggulangi pencemaran melalui pengolahan limbah cair
3. Mencegah dan menanggulangi pencemaran melalui Pengelolaan Sumber Pencemar Udara
4. Meningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan
5. Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat
6. Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan
7. Meningkatkan Operasional Layanan Laboratorium Lingkungan
8. Optimalisasi Operasional TPA
9. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme SDM Aparatur

5.1..2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran dan Tujuan organisasi.

Kebijakan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep adalah:

1. Penerapan Zero Waste
2. Pencapaian baku mutu Kualitas Air
3. Pencapaian baku mutu Kualitas Udara
4. Menerapkan peraturan - perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah
5. Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Konservasi SDA
7. Optimalisasi Pelayanan Masyarakat
8. Penerapan Proses Sanitary Landfill secara optimal
9. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pelayanan administrasi perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep untuk tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 dan untuk revisi rencana program dan kegiatan dapat dilihat vpada tabel 6.2 dibawah ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan											
								2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatkan Mutu Kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan yang didukung dengan Organisasi Birokrasi dan Kompetensi SDM yang cukup guna mendukung terwujudnya Sumenep maju	Tersedianya fasilitas pendukung pelayanan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya dukungan pengiriman surat menyurat kantor dan materai	lancarnya operasi administrasi kantor	100%	4.295	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	5.000		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terwujudnya penyediaan listrik, air dan telepone		100%	114.000	100%	120.000	100%	130.000	100%	140.000	100%	150.000	150.000		
				Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		100%	6.943	100%	7.500	100%	8.000	100%	8.500	100%	10.000	10.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	20.000	100%	22.000	100%	25.000	100%	30.000	100%	35.000	35.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100%	15.000	100%	16.500	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	15.000		

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%	10.605	100%	12.000	100%	14.000	100%	16.000	100%	18.000	100%	18.000				
				Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100%	23.960	100%	25.000	100%	27.000	100%	29.000	100%	31.000	100%	31.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Hartan			100%	33.018	100%	35.000	100%	38.000	100%	41.000	100%	45.000	100%	45.000				
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Terlaksananya Perjalana n Dinas Luar Daerah			100%	125.000	100%	135.000	100%	145.000	100%	155.000	100%	165.000	100%	165.000				
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Perjalana n Dinas Dalam Daerah			100%	15.000	100%	16.000	100%	17.000	100%	18.000	100%	19.000	100%	19.000				
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran			100%	144.350	100%	150.000	100%	155.000	100%	160.000	100%	165.000	100%	165.000				
				Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran			100%	30.000	100%	50.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000				

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			
								TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)	TARGET	Rp (.000)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur			100%	500.000											
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan perlengkapan gedung kantor				100%	500.000				100%	500.000					100%	50.000
				Pengadaan mebeleur	Terwujudnya Pengadaan mebeleur				100%	75.000				100%	100.000						
				Pengadaan Komputer	Terwujudnya Pengadaan Komputer			100%	56.550											100%	100.000
				Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Terwujudnya Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi					100%	135.000									100%	75.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			100%	50.000		55.000		100%	60.000		65.000			100%	75.000	75.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100%	142.400		145.000		100%	150.000		155.000			100%	160.000	160.000

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016-2021									
								Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat	meningkatnya kapasitas aparatur		10 org	10.000	15 org	15.000	20 org	20.000	20 org	20.000	20 org	20.000
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	3.300	100%	3.500	100%	3.700	100%	3.900	100%	4.000
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran			100%	3.000	100%	3.300	100%	3.600	100%	3.800	100%	4.000
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran			100%	3.700	100%	4.000	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan											
								2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun			100%	5.000	100%	5.500	100%	6.000	100%	6.500	100%	7.000	100%	7.000
				Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan Kinerja			100%	3.000	100%	3.300	100%	3.600	100%	3.800	100%	4.000	100%	4.000
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			100%	3.300	100%	3.500	100%	3.700	100%	3.900	100%	4.000	100%	4.000
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD			100%	6.000	100%	6.500	100%	7.000	100%	7.500	100%	8.000	100%	8.000
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)			100%	4.000	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.500	100%	6.000	100%	6.000
				Penyusunan Laporan Barang Semesteran	Tersusunnya Laporan Barang Semesteran			100%	3.700	100%	4.000	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.500	100%	5.500
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			100%	3.700	100%	4.000	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.500	100%	5.500

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016-2021											
								2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
				Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)			100%	3.700	100%	4.000	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.500		
				Penyusunan Laporan Realisasi belanja Penatausahaan SPJ	Tersusunnya Laporan Realisasi belanja Penatausahaan SPJ			100%	6.000	100%	6.500	100%	7.000	100%	7.500	100%	8.000		
	Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tanah	Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terwujudnya pengadaaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terkelolanya Persampahan		152 unit	850.570	155 unit	875.665	157 unit	895.000	160 unit	905.633	165 unit	1.000.000		
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah menjadi kompos			3 unit depo	177.000	3 unit depo	185.000	3 unit depo	200.000	3 unit depo	225.000	3 unit depo	250.000		
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya lomba kebersihan antar desa/kelurahan dan Pembinaan Kader Lingkungan			3 Kecamatan	87.000	5 Kecamatan	100.000	7 Kecamatan	150.000	9 Kecamatan	185.000	12 Kecamatan	215.000		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya laporan Money Pengelolan			1 laporan	50.000	1 laporan	55.000	1 laporan	65.000	1 laporan	75.000	1 laporan	100.000		

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016-2021							
								Targe t	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)
				Pembinaan Penataan Kegiatan pada Dokumen lingkungan kepada pengusaha	Peningkatan Ketaatan Pelaksanaan kegiatan/usaha pada dokumen lingkungan			30 Keg/Usaha	150.000	30 Keg/Usaha	200.000	30 Keg/Usaha	200.000	30 Keg/Usaha	200.000
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Teraksan anyanya Pengelolaan B3 dan Limbah B3			30 Keg/Usaha	150.000	30 Keg/Usaha	200.000	30 Keg/Usaha	200.000	30 Keg/Usaha	200.000
				Koordinasi Penyusunan AMDAL	Penataan Usaha/Kegiatan pada Dokumen Lingkungan			50 Keg/Usaha	200.000	50 Keg/Usaha	200.000	50 Keg/Usaha	200.000	50 Keg/Usaha	200.000
				Inventarisasi Data Sumber Pencemar Lingkungan dan Potensi Kerusakan Lingkungan Kabupaten Sumenep	Tersusun nya data Sumber Pencemar Lingkungan dan Potensi Kerusakan Lingkungan Kabupaten Sumenep			27 Kecamatan	650.000						
				Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terkendalinya Dampak Perubahan Iklim			1 Desa Berseri	600.000	1 Desa Berseri	600.000	1 Desa Berseri	600.000	1 Desa Berseri	600.000

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			
								Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA					250 org	150.000	250 org	150.000	250 org	150.000						
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan					2 Lokasi	100.000	4 lokasi	200.000								
	Meningkatnya perlindungan sumber daya air	Cakupan Pengelolaan wilayah RTH dan Sumber Sumber air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Peningkatan Perlindungan Sumber Daya Alam			1 paket	250.000	1 paket	250.000	1 paket	250.000	1 paket	250.000	1 paket	250.000	1 paket	250.000	
				Pantai dan Laut Lestari	Terlaksananya Sosialisasi							250 org	150.000			250 org	150.000			250 org	150.000
				Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Terwujudnya Perlindungan Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air					3 Ha	150.000	4 Ha	200.000								
				Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan konservasi SDA					1 paket	100.000	1 paket	100.000								

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
								Targe t	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et	Rp (.000)	Targ et
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA															
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan															
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup														
				Program Menuju Indonesia Hijau	Tersusunnya Laporan Menuju Indonesia Hijau															

Tabel 6.2

Review Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)	Target	Rp (.000)
1	Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Vegetasi	1 Indeks Kualitas Air	1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber-sumber pencemaran	1 Luas Kawasan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1 Volume Sampah yang diangkut ke TPA	1 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1 Volume Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	400 m3	850.000	450 m3	950.000	500 m3	1.100.000
							2 Kebersihan Lingkungan	2 Cakupan Layanan Kebersihan	3 Kemanan	3.000.000	3 Kemanan	3.250.000	3 Kemanan	3.500.000
							3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persampahan dan Limbah	3 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000
							4 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1 Paket	2.250.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.750.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									1 laporan	50.000	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000
				2 Prosentase Sungai yang tidak tercemar	2 Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air	1 Jumlah Sungai yang mempunyai status mutu tidak tercemar	5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Fasilitas Teknis	5 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan <td>50.000</td> <td>1 laporan <td>50.000</td> <td>1 laporan <td>50.000</td> </td></td>	50.000	1 laporan <td>50.000</td> <td>1 laporan <td>50.000</td> </td>	50.000	1 laporan <td>50.000</td>	50.000
							1 Pemantauan dan Pengendalian pencemaran Air dan Tanah	1 Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	78 sampel	280.000	87 sampel	300.000	96 sampel	350.000
							2 Penyediaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	2 Jumlah sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	1000 unit	600.000	3 unit	350.000	4 unit	475.000
							3 Penanganan dan Pemulihan pencemaran Air dan Tanah	3 Jumlah Penanganan dan Pemulihan pencemaran Air dan Tanah	5 sungai dan saluran	400.000	6 sungai dan saluran	450.000	7 sungai dan saluran	500.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021			
								tanah								
							4 Penyediaan sarana dan prasarana Pemulihan dan Penanggulangan Pencemaran Air dan Tanah	4 Jumlah sarana dan prasarana Pemulihan dan Penanggulangan Pencemaran Air dan Tanah	2 unit	300.000	3 unit	450.000	4 unit	700.000		
							5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air	5 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17 Kemanusiaan daratan	80.000	17 Kemanusiaan daratan	80.000	17 Kemanusiaan daratan	80.000		
					3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1 Jumlah pengelolaan Sanitasi	1 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya	1 Jumlah Masyarakat yang terlibat	100 orang	350.000	150 orang	450.000	200 orang	600.000		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									12 sampel	120.000	15 sampel	175.000	18 sampel	225.000
				3 Prosentase Titik Pantau dengan kualitas parameter NO2 dan SO2 dibawah ambang batas	4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara	1 Nilai Parameter NO2 dan SO2 dibawah ambang batas	1 Pemantauan dan Pengendalian pencemaran Udara	1 Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	12 sampel	120.000	15 sampel	175.000	18 sampel	225.000
							2 Penyediaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	2 Jumlah sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	2 unit	400.000	3 unit	650.000	4 unit	850.000
							3 Penanganan dan Pemulihan pencemaran Udara	3 Jumlah Penanganan dan Pemulihan pencemaran Udara	2 unit	450.000	3 unit	650.000	4 unit	900.000
							4 Penyediaan sarana dan prasarana Pemulihan dan Penanganan	4 Jumlah sarana dan prasarana Pemulihan dan Penanganan	2 unit	450.000	3 unit	650.000	4 unit	900.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
							<p>langan Pencemaran Udara</p> <p>5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara</p>	<p>Pencemaran Udara</p> <p>5 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>		17 Kecamatan daratan	17 Kecamatan daratan	100.000	120.000	150.000
		4 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup			5 Program Penataan Hukum	1 Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum Lingkungan	<p>1 Pelayanan Tindakan lanjut masyarakat akibat adanya pencemaran</p>	<p>1 Prosentase Pelayanan Tindakan lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran lingkungan</p>		100	1	120.000	130.000	140.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									50 keg/ ush	120.00 0	50 keg/ ush	130.00 0	50 keg/ ush	140.00 0
2							Pembinaan Petaan Dokumen lingkungan kepada pengusaha	2 Jumlah kegiatan /usaha yang dilakukan pembinaan	50 keg/ush	120.000	50 keg/ush	130.000	50 keg/ush	140.000
3							Pengawasan Industri/usaha Penghasil Limbah	3 Jumlah Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50 keg/ush	120.000	50 keg/ush	130.000	50 keg/ush	140.000
4							Sarana dan prasarana pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	4 Jumlah sarana dan prasarana pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	2 unit	120.000	2 unit	130.000	2 unit	140.000
5							Monitoring, evaluasi dan pelaporan Petaan Hukum	5 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021									
									10 OPD	310.000	10 OPD	365.000	10 OPD	392.000								
6	Program Peningkatan Kapasitas	1 Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	1 Penilaian Kota Sehat/Adipura	1 Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	1 Penilaian Kota Sehat/Adipura	1 Jumlah Lembaga/Instansi Koordinasi Penilaian Kota Sehat/A dipura	10 OPD	10 OPD	10 OPD	310.000	10 OPD	365.000	10 OPD	392.000								
															2 Penilaian Adiwiyata	2 Jumlah Lembaga/Instansi Koordinasi Program Adiwiyata	10 lembaga/skola h	285.000	10 lembaga/sekolah	300.000	10 lembaga/sekolah	320.000
4 Monitorin g, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kapasitas	4 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	65.000	1 laporan	80.000	1 laporan	87.000															

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									2019	2020	2019	2020	2019	2020
				5 Prosentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7 Program Inventarisasi Data dan Informasi	1 Jumlah Rekomendasi Dokumen Lingkungan	1 Sarana dan Prasarana Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan	2 Paket	500.000	2 Paket	1.500.000	1 Paket	900.000
							2 Penyusunan Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	2 Jumlah Laporan IKPLHD	1 laporan	100.000	1 laporan	110.000	1 laporan	120.000
							3 Penyusunan Dokumen Lingkungan	3 Jumlah lembaga / instansi penyusunan Dokumen Lingkungan	75 keg/ush	225.000	100 keg/ush	270.000	125 keg/ush	300.000
							4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi Data dan	4 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000	1 laporan	50.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
							Informasi	n						
					8 Program Penataan Lingkungan	1 Nilai Emisi GRK	1 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Jumlah Kampung Iklim	1 kampung iklim	500.000	1 kampung iklim	600.000	1 kampung iklim	750.000
				6 Prosentase Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi	9 Program Pemeliharaan Lingkungan	1 Penambahan Tutupan RTH	1 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1 Luas Penambahan RTH	7 ha	1.000.000	8 ha	1.100.000	10 ha	1.500.000
							2 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati	2 Jumlah Kawasan Konservasi	1 kawasan	350.000	1 kawasan	400.000	1 kawasan	450.000
							3 Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Lingkungan	3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Lingkungan	2 Paket	2.500.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.400.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
					1 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	1 Rehabilitasi Lahan Kritis	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemeliharaan Lingkungan	4 Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
								1 Luas Rehabilitasi lahan Kritis	3 ha	450.000	4 ha	550.000	5 ha	750.000
								2 Luas Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove	2 ha	1.000.000	2,5 ha	1.100.000	3 ha	1.500.000
					1 Penataan Laboratorium Lingkungan	1 Jumlah Layanan Laboratorium Lingkungan	1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	1 Jumlah Sampel yang diuji	300 sampel	525.000	350 sampel	620.000	400 sampel	700.000
				7 Prosentase Layanan Laboratorium										

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
				8 TPA dengan Sanitari Lanfill	1 Penataan TPA 2 TPA	1 Daya Tampung dan Daya Dukung TPA	1 Pengelolaan TPA	1 Jumlah Sampah yang terolah di TPA	140 m3/hr	1.000.000	145 m3/hr	1.250.000	150 m3/hr	1.500.000
				9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1 Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah Surat menyurat yang diadmindistrasikan	1000 surat	6.000	1000 surat	6.000	1000 surat	6.000
							2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	150.000	1 tahun	150.000	1 tahun	150.000
							3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	3 Jumlah bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1 tahun	8.000	1 tahun	8.000	1 tahun	8.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021	
									1 tahun	75.000	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000
							4 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	4 Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000
							5 Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	5 Jumlah komponen listrik yang diadakan	1 tahun	15.000	1 tahun	15.000	1 tahun	15.000
							6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	6 jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	1 tahun	30.000	1 tahun	30.000	1 tahun	30.000
							7 Penyediaan Makanan dan Minuman	7 jumlah tersedia makana dan minuman	1 tahun	40.000	1 tahun	40.000	1 tahun	40.000
							8 Rapat-kordinasi dan konsultasi	8 Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	200.000	1 tahun	200.000	1 tahun	200.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021		
								si							
							9 Peringatan Hari-Besar	9 Jumlah kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan akan	3 keg	150.000	3 keg	150.000	3 keg	150.000	
							10 Operasional UPTD	10 Jumlah Layanan UPTD yang disediakan	2 layanan	200.000	2 layanan	200.000	2 layanan	200.000	
							1 Penyediaan Jasa Layanan Kantor	1 jumlah layanan perkantoran yang disediakan	1 tahun	150.000	1 tahun	150.000	1 tahun	150.000	
							1 Pengadaan Kendaraa n Dinas Operasional	1 Jumlah Kendaraa n Dinas Opr. Yang dibeli	6 unit	150.000	6 unit	150.000	6 unit	150.000	
							3 Peralatan dan Perlengkapan	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	120.000	6 jenis	120.000	6 jenis	120.000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021		
							Gedung Kantor/rumah dinas	yang dibeli							
							1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	60.000	1 gedung	60.000	1 gedung	60.000	
							1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 unit	200.000	25 unit	200.000	25 unit	200.000	
							1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	15.000	10 jenis	15.000	10 jenis	15.000	
							1 Pendidikan dan pelatihan formal	1 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	5 org	75.000	5 org	75.000	5 org	75.000	
					1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% pengembangan kompetensi pegawai									

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2019		2020		2021			
								/bimtek								
							2 Pengelolan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	2 Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	6 jenis	250.000	6 jenis	250.000	6 jenis	250.000	6 jenis	250.000
					1 Program 5 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 Penyusunan Laporan Keuangan	1 Jumlah laporan keuangan yang disusun	6 laporan	50.000	6 laporan	50.000	6 laporan	50.000	6 laporan	50.000
							2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 dokumen	50.000	6 dokumen	50.000	6 dokumen	50.000	6 dokumen	50.000
							3 Pengembangan Sistem Informasi manajemen	3 Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 jenis	200.000			1 jenis	200.000		200.000

Tabel 6.3

Kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan

NO	TUJUAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Vegetasi	1. Belum tersedianya Data Potensi dan Kerusakan Sumberdaya Alam	1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber-sumber pencemar	Luas Kawasan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Melakukan Upaya Pengelolaan Sampah dan B3 dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	Penerapan Zero Waste	<p>Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - Kebersihan Lingkungan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Persampahan dan Limbah - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Fasilitas Teknis
		2. Peningkatan Beban Pencemaran baik industri maupun domestik		Prosentase Sungai yang tidak tercemar	Mencegah dan mengurangi pencemaran melalui pengolahan limbah cair	Pencapaian baku mutu Kualitas Air	<p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Pengendalian pencemaran Air dan Tanah - Penyediaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah - Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran Air dan Tanah

<p>Penyediaan sarana dan prasarana Pemulihan dan Penanggulangan Pencemaran Air dan Tanah</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air</p> <p>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan</p> <p>Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya</p>							
<p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Pengendalian pencemaran Udara - Penyediaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara - Penanggulangan dan Pemulihan - pencemaran Udara dan prasarana Pemulihan dan Penanggulangan Pencemaran Udara - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara 	<p>Pencapaian baku mutu Kualitas Udara</p>	<p>Mencegah dan mengurangi pencemaran melalui Pengelolaan Sumber Pencemar Udara</p>	<p>Prosentase Titik Pantau dengan kualitas parameter NO2 dan SO2 dibawah ambang batas</p>				
<p>Program Penuaan Hukum</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran 	<p>Menerapkan peraturan - perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan</p>	<p>eningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan</p>	<p>Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup</p>				

					kewenangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Petaan Dokumen lingkungan kepada pengusaha Pengawasan Industri/usaha Penghasil Limbah Sarana dan prasarana pengawasan dan Pengaduan Masyarakat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Petaan Hukum Program Peningkatan Kapasitas kegiatan - Penilaian Kota Sehat/Adipura - Penilaian Adiwiyata Sarana dan prasarana peningkatan kapasitas - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kapasitas
				3.	Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Program Inventarisasi Data dan Informasi - Kegiatan : Sarana dan Prasarana Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan - Penyusunan Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Penyusunan Dokumen Lingkungan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi Data dan Informasi
				3.	Masih Luasnya Area lahan kritis di Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				3.	Prosentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat
				4.	Prosentase Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan
				4.	Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Konservasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemeliharaan Lingkungan - Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem - Pengembangan dan

						<p>Pemantapan Kawasan Konservasi, dan Keanekaragaman Hayati</p> <p>Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Lingkungan</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Pemeliharaan Lingkungan</p> <p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan</p> <p>Cadangan Sumber daya Alam</p> <p>Kegiatan Rehabilitasi lahan</p> <p>Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk</p>
			<p>Prosentase Layanan Laboratorium</p>	<p>Meningkatkan Operasional Layanan Laboratorium Lingkungan</p>	<p>Optimalisasi Pelayanan Masyarakat</p>	<p>Program Penataan Laboratorium Lingkungan</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan</p>
			<p>TPA dengan Sanitari Lanfill</p>	<p>Optimalisasi Operasional TPA</p>	<p>Penerapan Proses Sanitary Lanfill secara optimal</p>	<p>Program Penataan TPA</p> <p>Kegiatan Pengelolaan TPA</p>
			<p>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme SDM Aparatur</p>	<p>Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan;
5. Menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur permukiman antar wilayah kepulauan dan daratan;
6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerah;
8. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah;
9. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
11. Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel;
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holder dalam

13. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat /stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
14. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat Nasionalisme (NKRI);
15. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga.

7.2 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan hidup, Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan yaitu “ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”

Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja Dinas Lingkungan hidup yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam tabel berikut ini (7.1)